

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar (PMDPPK) merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 6 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) adalah sistem pelaporan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung-jawaban secara periodik. Sistem LAKjIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan SPIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. LKjIP bermanfaat antara lain untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.

2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, dan merupakan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.
4. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, serta penyempurnaan program dan kegiatan.

Untuk dapat mengetahui kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis yang merupakan tolok ukur sejauh mana keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dapat mencapai kinerjanya.

Untuk menjelaskan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2018 maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKj).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan LKj ini telah mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 20 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

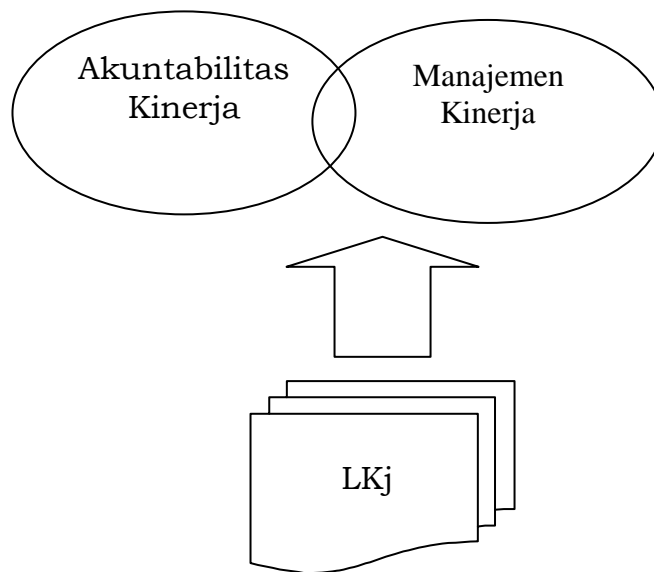
Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah

Datar selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) 2018 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Esensi dari sistem LKj bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Tanah Datar. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem LAKjIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar untuk

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Tanah Datar dan seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKj tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj oleh setiap instansi pemerintah.



Dengan demikian, analisa perencanaan dalam penyampaian LKj Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKj 2018 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2018. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2018.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKj 2018 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.2 Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja

A. KEWENANGAN.

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan keluarga berencana-keluarga sejahtera (KB-KS) perlu koordinasi yang baik antara pemerintah dengan stakeholder terkait serta dukungan dan partisipasi masyarakat. Maka kebijakan Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan kewenangan yang telah dilimpahkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya di bawah Kepala Badan terdapat 1 Sekretariat, 3 Bidang, dan 14 UPTD sebagai berikut:

2. Sekretariat terdiri dari,

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

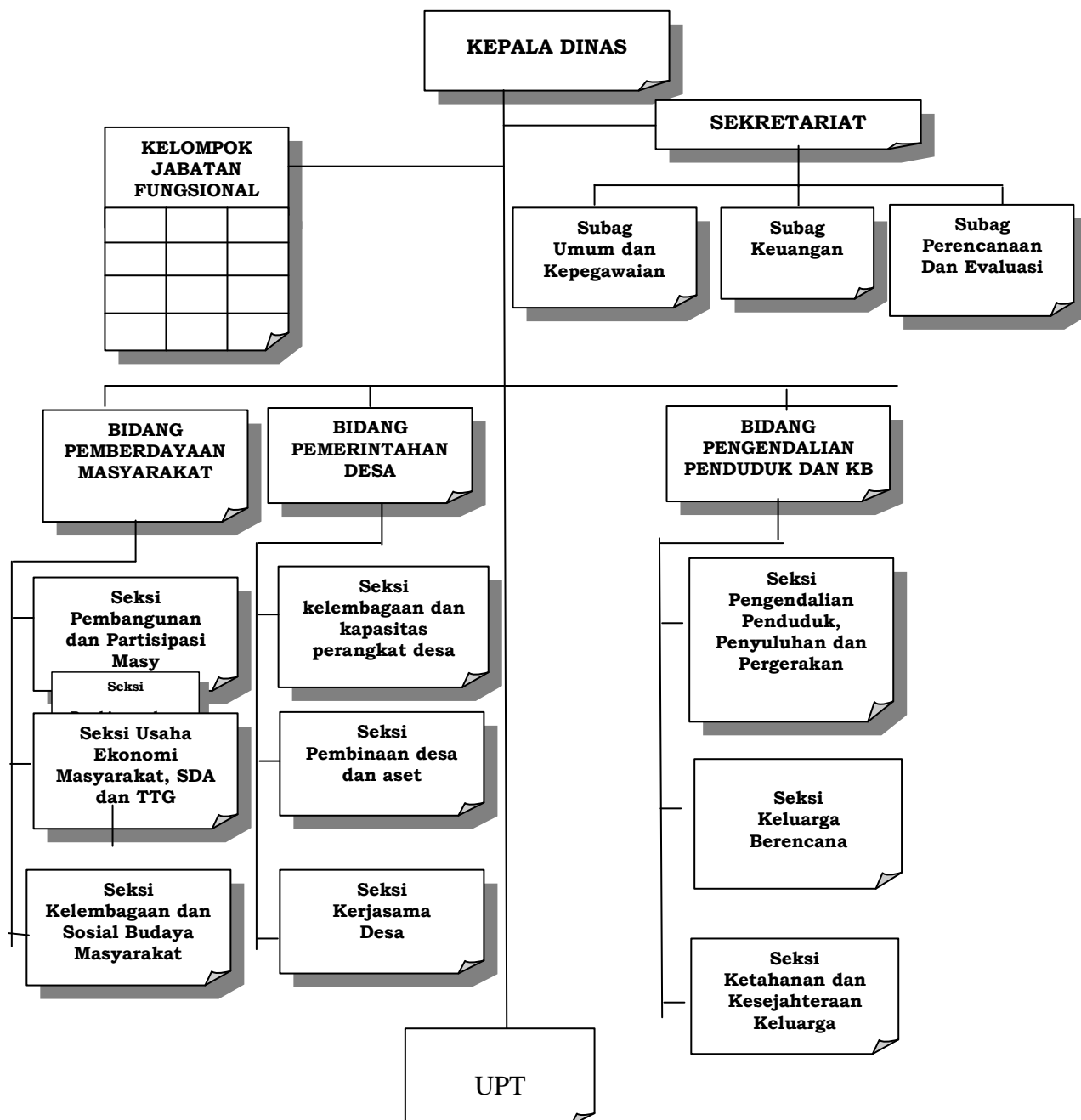
3. Bidang yang terdiri dari:

- a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- b. Bidang Pemerintahan Desa
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4. UPTD Badan pada 14 Kecamatan, yang terdiri dari:

- a. UPTD Kecamatan X Koto
- b. UPTD Batipuh
- c. UPTD Batipuh Selatan
- d. UPTD Pariangan
- e. UPTD Rambatan
- f. UPTD Lima Kaum
- g. UPTD Tanjung Emas
- h. UPTD Padang Ganting
- i. UPTD Lintau Buo
- j. UPTD Lintau Buo Utara
- k. UPTD Sungayang
- l. UPTD Sungai Tarab
- m. UPTD Salimpaung
- n. UPTD Tanjung Baru

Gambar 1.
Struktur dan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah
Datar
sesuai PERDA Nomor 9 Tahun 2016



Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar adalah :

“Sebagai pelaksana teknis operasional merencanakan, membina, menyusun konsep, pedoman dan petunjuk teknis dalam hal pemberdayaan masyarakat dan desa serta pengendalian penduduk melalui lembaga-lembaga formal dan informal yang ada di Kabupaten Tanah Datar”

Untuk menjalankan tugas pokok yang diamanatkan oleh Masyarakat Tanah Datar melalui Peraturan Daerah tersebut, maka tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten adalah :

1. KEPALA DINAS

- a. membantu tugas pemerintah daerah merumuskan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan sekretariat daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. melaksanakan pembinaan dan akuntabilitas kinerja instansi Dinas;
- f. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
- g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIS

- a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
- f. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;
- h. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- i. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;
- k. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;

- l. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
- m. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- n. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- o. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- p. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- q. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;
- r. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- s. melaksanakan pengusulan/penunjukan Bendahara dan Pembantu Bendahara;
- t. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
- u. mengelola perencanaan dan program Dinas;
- v. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
- w. mengoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
- x. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas;
- y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;

- b. menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- d. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- g. melakukan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- h. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. melaksanakan administrasi pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penatausahaan barang milik/kekayaan Daerah dan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI.

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- c. mengelola data dan informasi;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- e. menyusun laporan Sekretariat dan Dinas.
- f. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN.

- a. menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang undangan.
- c. memproses Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- g. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan dinas.
- h. Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan.

- i. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

- a. Menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Merumuskan draf Rencana Strategis (RENSTRA) dan draf Rencana Kerja (RENJA) di bidang pemberdayaan masyarakat.
- c. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat.
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan pemberdayaan masyarakat.;
- e. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja pada bidang pemberdayaan masyarakat.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. KASI PEMBANGUNAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT.

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja seksi Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat.
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;

- d. mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait.
- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pada seksi pembangunan dan partisipasi masyarakat.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. KASI USAHA EKONOMI MASYARAKAT,SUMBER DAYA ALAM DAN TTG.

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja seksi Usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan TTG.
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait.
- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pada seksi usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan TTG.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

9. KASI KELEMBAGAAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT.

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;

- b. menyusun rencana kerja dan program kerja seksi kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait.
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan pada seksi kelembagaan dan social budaya masyarakat.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

10. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA.

- a. Menyelenggarakan penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Merumuskan draf Rencana Strategis (RENSTRA) dan draf Rencana Kerja (RENJA) di bidang Pemerintahan Desa.
- c. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan kapasitas perangkat desa, pembinaan desa dan asset desa serta kerjasama desa.
- d. Menyusun rencana kelembagaan dan kapasitas perangkat desa, pembinaan desa dan asset desa serta kerjasama desa.
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

11. KASI KELEMBAGAAN DAN KAPASITAS PERANGKAT DESA.

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja seksi kelembagaan dan kapasitas perangkat desa.
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- g. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. KASI PEMBINAAN DESA DAN ASET.

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
- b. menyusun rencana dan program kerja seksi Pembinaan Desa dan Aset.
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- d. mengoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- e. Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait.

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

13. KASI KERJASAMA DESA.

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas.
- b. menyusun rencana program dan kegiatan seksi kerjasama desa.
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan
- d. mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- e. melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait.
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan pada seksi kerjasama desa.
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

14. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA DAN BERENCANA

- a. menyelenggaran dan menganalisa program dan urusan yang menjadi kewenangan sesuai peraturan perundang - undangan.
- b. merumuskan draf Rencana Strategis (RENSTRA) dan draf Rencana Kerja (RENJA) di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, penyuluhan dan

- pergerakan keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- d. menyusun rencana kegiatan pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas.
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

15. KASI PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PERGERAKAN

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas.
- b. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan.
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan.
- d. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- e. melaksanakan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan
- f. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.melaksanakan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
- g. melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk daerah.

- h. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB.
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- j. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- k. mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- l. melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait.
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

16. KASI KELUARGA BERENCANA.

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas.
- b. menyusun rencana dan program kerja seksi keluarga berencana.
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan.
- d. merumuskan kebijakan teknis daerah pada seksi keluarga berencana.

- e. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria pada seksi keluarga berencana.
- f. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat /obat kontrasepsi di daerah.
- g. Melaksanakan pelayanan KB di daerah.
- h. Melaksanakan pembinaan kesertaan ber KB di daerah.
- i. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi pada seksi keluarga berencana.
- j. Mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait.
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pada seksi keluarga berencana.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

17. KASI KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

- a. mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas.
- b. menyusun rencana dan program kerja seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan
- d. merumuskan kebijakan teknis daerah pada seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- e. melaksanakan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- f. melaksanakan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga balita, remaja dan lansia.
- g. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.
- h. menitoring dan evaluasi kegiatan pada seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- i. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi kegiatan pada seksi kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
- j. mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- k. melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan unit kerja terkait.
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

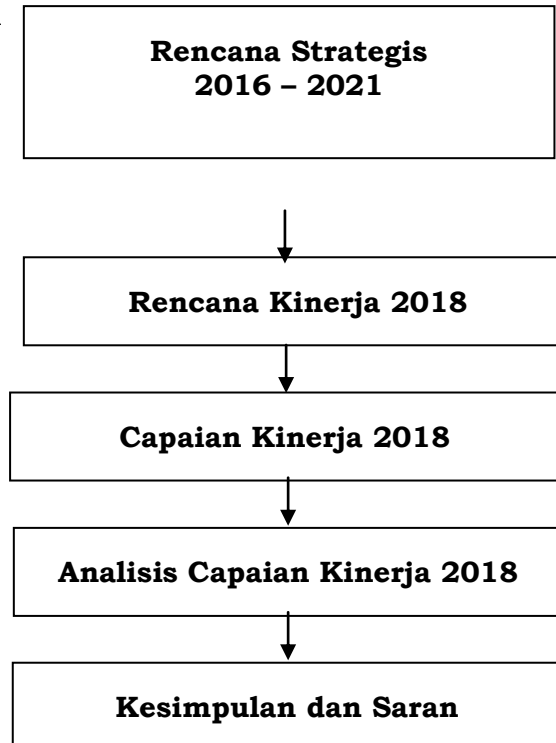
B). STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA.

Sesuai Sesuai dengan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengembangan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar, yang terdiri dari Kepala Badan, Satu Sekretariat, 3 (tiga) Bidang , 3 (tiga) Sub

Bidang, 9 (sembilan) seksi, dan 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis, seperti Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar diatas.

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja selama Tahun 2017. Capaian kinerja (*Performance results*) Tahun 2017 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance plan*) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini



C). LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun eksternal. Untuk itu, perlu dilakukan analisis yang memadai terhadap faktor lingkungan baik berupa kekuatan dan peluang maupun hambatan dan ancaman yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan, sasaran sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical succes factors*), faktor-faktor penentu keberhasilan yang berhasil diidentifikasi berdasarkan hasil analisis terhadap pengaruh lingkungan internal dan eksternal.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar, yakni sebagai pelaksana teknis operasional yang merencanakan, membina, menyusun konsep, pedoman dan petunjuk teknis dalam hal pelayanan kepada masyarakat dan keluarga dengan memberdayakannya serta melayani KB melalui lembaga-lembaga formal dan informal.

Untuk lebih detailnya lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dari 2 aspek :

1. Kondisi Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar, mencakup organisasi dan pola pembangunan serta pelayanan masyarakat yang dilaksanakan masing-masing bidang.
2. Kondisi dan situasi Eksternal dari masyarakat dan keluarga yang menjadi sasaran kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar di masing-masing bidang.

Secara organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar adalah gabungan dari beberapa instansi sebelumnya yakni Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Pemberdayaan Masyarakat, Desa (PMD) yang kemudian menjadi beberapa bidang. Masing-masing bidang tersebut secara kontekstual adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keluarga, serta memfasilitasi menanggulangi masalah sosial masyarakat. Kurangnya personil untuk menempati posisi dan tugas di setiap Nagari, yakni baru 41 orang petugas fungsional yang mempunyai wilayah kerja, jadi tidak proporsional untuk bisa melayani masyarakat sesuai kondisi situasi, serta aksesibilitas Nagari yang beragam. Dan 14 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) belum sesuai sinergi kinerja antara perencana dan pimpinan kegiatan, koordinator kegiatan, serta penanggungjawab kegiatan dengan tenaga UPTD dan Fungsional dilapangan. Dan bagi tenaga lapangan belum memenuhi standar kompetensi yang sesuai untuk berkoordinasi dengan Camat dan UPTD lainnya.

D). SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2018, Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan informasi umum tentang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar serta uraian singkat tugas dan fungsi yang masing-masing jabatan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menyajikan gambaran mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis) dalam rencana jangka menengah (RPJMD), rencana jangka tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian evaluasi capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, analisis capaian kinerja per-sasaran dan per-tujuan, termasuk faktor pendorong keberhasilan, permasalahan, kendala utama dan langkah strategi penanganannya serta perbandingan capaian kinerja tahun 2017 dengan capaian kinerja tahun 2018.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 yang dirangkum dalam kesimpulan dan saran terhadap Laporan Kinerja ini.

BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. VISI DAN MISI

Visi dan Misi merupakan landasan pemikiran yang rasional tentang hasrat dan upaya yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan sebagai pihak yang terlibat dan terkait. Pernyataan visi dan misi menjadi dasar bagi perumusan kerangka kebijakan dan strategi pembangunan oleh seluruh pelaku pembangunan khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar sehingga disepakati lah visi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021 adalah :

“ Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Nagari dengan berbasis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam keluarga kecil Bahagia sejahtera ”

1. Penjelasan dari Visi

Makna yang tersirat dalam visi tersebut antara lain :

“Kemandirian” maksudnya: masyarakat dan keluarga secara bertahap mampu membangun diri dalam hal ekonomi dan pembangunan memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat lingkungannya.

2. Berdasarkan visi tersebut ditetapkan 4 misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

1. Melaksanakan Tata Pemerintahan Yang Baik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat nagari.
3. Mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan dan Teknologi Tepat Guna secara optimal dengan mendayagunakan potensi nagari dan lembaga ekonomi nagari.
4. Mewujudkan keluarga berkualitas, bahagia dan sejahtera

B. TUJUAN STRATEGIS

Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar mampu mencapai tujuan dan sasarannya, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti dapat mengetahui apa kelebihan dan kekurangan untuk melaksanakan suatu tujuan dan sasaran.

Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar menetapkan tujuan sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri.**
- 2. Terselenggaranya pemerintahan desa/nagari yang bersih dan akuntabel.**
- 3. Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera melalui pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga.**

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, yang secara kolektif menggambarkan sasaran strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut.

Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Sasaran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Tabel 2.1

Tujuan 1 : Terwujudnya Kemampuan dan Kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri.

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
|--|---|---------------|----------------|
| 1. Meningkatkan angka swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 75 % | 100 % |
| | 2. Kapasitas lembaga kemasyarakatan dan kader pemberdayaan masyarakat | 85 % | 100 % |
| | 3. Kelompok ekonomi perempuan yang aktif | 80 % | 100 % |
| 2. Meningkatkan dan pengembangan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat pedesaan | 1. Peningkatan kapasitas dan jumlah kelembagaan ekonomi masyarakat | 75 klp | 100 % |
| | 2. Kelompok masyarakat pemanfaat TTG | 10 klp | 100 % |

Tabel.2.2

Tujuan 2 : Terselenggaranya pemerintahan desa/nagari yang bersih dan akuntabel

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
|--|---|---------------|----------------|
| 1. Tercitanya tata kelola pemerintahan nagari yang baik dan bersih | 1. Jumlah tata kelola pemerintahan nagari yang baik | 75 Nagari | 100 % |
| | 2. Jumlah tata kelola pemerintahan nagari yang bersih | 75 Nagari | 100 % |

Tabel.2.3

Tujuan 3 : Terwujudnya Keluarga yang berkualitas melalui pengendalian penduduk, keluarga berencana dan ketahanan keluarga.

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
|---|--|---------------|----------------|
| 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB | 1. Rata-rata jumlah anak per keluarga | 2,5 | 97 % |
| | 2 Rasio Akseptor KB | 77.00 % | 98 % |
| | 3. Kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | 10,88 | |
| 2. Meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi | 1. Jumlah PIK Remaja yang aktif | 14 klp | 121 % |
| | 2. Jumlah remaja yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi | 2.500 org | 100 % |
| 3. Meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga | 1. Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang aktif | 70 klp | 91 % |
| | 2. Jumlah kelompok BKB Holistik Integratif | 8 klp | 100 % |

Sebagai pedoman kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan tujuan dan sasaran kerja jangka menengah, seperti terlihat pada tabel 2.5. berikut ini;

Tabel 2.5
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN
2016-2021

| N O | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE | | | | | |
|--------|--|---|---|--------------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Terwujudnya kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan agar secara aktif masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri | Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 70 % | 75 % | 75 % | 78 % | 80 % | 85 % |
| | | | Persentase kapasitas lembaga kemasyarakatan kader pemberdayaan masyarakat | 80 % | 85 % | 85 % | 87 % | 88 % | 89 % |
| | | | Persentase kelompok ekonomi perempuan yang aktif | 77 % | 80 % | 80 % | 81 % | 83 % | 86 % |
| | | Meningkatnya pengembangan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat pedesaan | Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat | 75 klp | 75 klp | 75 klp | 90 klp | 100 klp | 100 klp |
| | | | Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat Teknologi Tepat | 6 klp | 8 klp | 10 klp | 12 klp | 13 klp | 14 klp |

| N O | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE | | | | | |
|--------|--|--|---|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | | | Guna (TTG) | | | | | | |
| 2. | Terselenggara nya pemerintahan desa/nagari yang bersih dan akuntabel | Terciptanya tata kelola pemerintahan nagari yang baik dan bersih | Jumlah tata kelola pemerintahan nagari yang baik | 75 nag | 75 nag | 75 nag | 75 nag | 75 nag | 75 nag |
| | | | Jumlah tata kelola pemerintahan nagari yang bersih | 75 nag | 75 nag | 75 nag | 75 nag | 75 nag | 75 nag |
| 3. | Terwujudnya keluarga berkualitas melalui pengendalian penduduk, keluarga berencana dan ketahanan keluarga | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB | Rata-rata anak per keluarga | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 |
| | | | Rasio akseptor KB | 68,86 | 73,87 | 77,00 | 78,65 | 79,02 | 79,50 |
| | | | Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | 12,5 | 11,5 | 10,88 | 9,25 | 8,04 | 8,00 |
| | | Meningkatnya pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi | Jumlah Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif | 6 klp | 8 klp | 14 klp | 18 klp | 22 klp | 26 klp |
| | | | Jumlah remaja yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi | 2.000 org | 2.400 klp | 2.500 org | 2.800 org | 3.000 org | 3.500 org |
| | | Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan keluarga | Jumlah kelompok BKB,BKR,BKL dan UPPKS yang aktif | 42 klp | 56 klp | 70 klp | 84 klp | 98 klp | 112 klp |
| | | | Jumlah kelompok BKB Holistik Integratif | 4 klp | 5 klp | 8 klp | 11 klp | 14 klp | 17 klp |

A. SASARAN DAN PROGRAM

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar menetapkan sasaran dan program yang

akan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun, seperti terlihat pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Sasaran Strategis dan Program Dinas PMDPPKB Tahun 2018

| Sasaran Strategis | Program |
|--|---|
| 1. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 1. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan |
| 2. Meningkatkan pengembangan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat pedesaan | 1. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan |
| 3. Terciptanya tata kelola pemerintahan nagari yang baik dan bersih | 1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa 2. Pendidikan Politik Masyarakat 4. Program Kerjasama Pembangunan 5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 6. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari |
| 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB | 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Pelayanan Kontrasepsi |
| 5. Meningkatnya pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi | 1. Program Kesehatan reproduksi remaja 2. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 3. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KKR |
| 6. Meningkatnya pemberdayaan dan ketahanan keluarga | 1. Program penyiapan tenaga pendamping bina keluarga |

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Tujuan penetapan IKU ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun pencapaian dari Indikator Kinerja Utama pada Dinas PMDPPKB Kabupaten Tanah Datar tahun 2018, dapat terlihat pada tabel.2.7 berikut :

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama Dinas PMDPPKB Tahun 2018

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Formulasi Pengukuran |
|-----|---|-------------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | | (4) |
| 1. | Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 1 | Persentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan | $P = F/N \times 100\%$ Ket : P = Perencanaan, F = Frekwensi, N = jumlah responden |
| | | 2 | Persentase Kapasitas lembaga kemasyarakatan dan kader pemberdayaan masyarakat | Jumlah lembaga ekonomi nagari yang dilatih/Jumlah lembaga nagai x 100 % |
| | | 3 | Persentase Kelompok ekonomi perempuan yang aktif | Jumlah aparatur yang sudah mengikuti pelatihan/Jumlah seluruh aparatur Desa X 100 % |
| 2. | Meningkatnya pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat pedesaan | 1 | Jumlah Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat | Jumlah kelompok SPP yang melaksanakan RAT |
| | | 2 | Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG) | Jumlah Pos Pelayanan TTG (Posyantek) yang dibina |
| 3. | Terciptanya tata kelola pemerintahan nagari yang baik dan bersih | 1 | Jumlah tata kelola pemerintahan nagari yang bersih | Jumlah laporan penggunaan dana nagari yang diperiksa |
| 4. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber KB | 1 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | Jumlah anak hidup/Jumlah keluarga |
| | | 2 | Rasio Akseptor KB | Jumlah PUS sasaran yang menjadi KB aktif yang dilayani / Jumlah PUS X 100 % |
| | | 3 | Kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi / Jumlah PUS yang menjadi peserta KB X 100 % |
| 5. | Meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi | 1 | Jumlah remaja yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi | Jumlah remaja yang mendapatkan materi tentang kesehatan reproduksi |
| | | 2 | Jumlah Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang | Jumlah PIK Remaja yang aktif melakukan kegiatan |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | | | aktif | |
| 6. | Meningkatnya pemberdayaan ketahanan keluarga | 1 | Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang mandiri | Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang amndiri |
| | | 2 | Jumlah Kelompok BKB Holistik Integratif | Jumlah BKB Holistik Integratif |

1. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 dapat dilihat dari tabel 2.8 berikut :

Tabel.2.8

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas PMDPPKB Tahun 2018

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target |
|-----|---|-------------------------------|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) |
| 1. | Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 1 | Persentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 75 % |
| | | 2 | Persentase Kapasitas lembaga kemasyarakatan dan kader pemberdayaan masyarakat | 85 % |
| | | 3. | Persentase Kelompok ekonomi perempuan yang aktif | 80 % |
| 2. | Meningkatnya pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat pedesaan | 1 | Jumlah Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat | 75 klp |
| | | 2 | Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG) | 10 klp |
| 3. | Terciptanya tata kelola pemerintahan nagari yang baik dan bersih | 1 | Jumlah tata kelola pemerintahan nagari yang baik | 75 nagari |
| | | 2 | Jumlah tata kelola pemerintahan nagari yang bersih | 75 nagari |
| 4. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam be KB | 1 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | 2,5 |
| | | 2 | Rasio Akseptor KB | 77,00 % |
| | | 3 | Kebutuhan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi (unneed need) | 10,88 |
| 5. | Meningkatkan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi | 1 | Jumlah Remaja yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi | 2.500 org |
| | | 2 | Jumlah Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif | 14 klp |

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|--------|
| 6. | Meningkatnya pemberdayaan ketahanan keluarga | 1 | Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang mandiri | | 70 klp |
| | | 2 | Jumlah Kelompok BKB Holistik Integratif | | 8 klp |

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi rencana kerja tahun 2018 diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam Dokumen Rencana Kinerja 2018.

Target ditetapkan untuk setiap indikator kerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja (*Input, output dan outcome*) tingkat kegiatan.

2. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2018

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Visi yang ingin dicapai Kabupaten Tanah datar sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar 2016 - 2021 adalah “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar yang madani, berbudaya dan sejahtera dalam nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ”

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, memperhatikan permasalahan yang dihadapi, serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi daerah serta hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai dengan tema pembangunan tahun 2018.
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
3. Merupakan tugas pemerintah daerah sebagai pelaku utama dalam mendorong, memfasilitasi, mengkoordinasikan, memberi insentif agar kegiatan pembangunan yang dilakukan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.
4. Merupakan kewajiban pemerintah menyediakan kebutuhan dasar, investasi pemerintah dan layanan publik.
5. Realistis untuk dilaksanakan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan bidang Pendidikan.
2. Pembangunan bidang Kesehatan.
3. Pembangunan bidang kesehatan.
4. Pembangunan bidang kepariwisataan.

Sejalan dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan kinerja (Tapkin) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 juga mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan penjabaran dari rencana strategis jangka menengah periode 2016 - 2021 yang telah ditetapkan.

Pada Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 juga memuat anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran.

Secara ringkas gambaran sasaran, indikator kinerja dan target kinerja pada Penetapan Kinerja tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.2.9
PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) DINAS PMDPPKB TAHUN 2018

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|-----|---|-------------------|---|-----------|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | | | (4) | |
| 1. | Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan . | 1 | Persentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 75 % | Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan | |
| | | 2 | Persentase Kapasitas lembaga kemasyarakatan dan kader pemberdayaan masyarakat | 85 % | | |
| | | 3. | Persentase Kelompok ekonomi perempuan yang aktif | 80 % | | |
| 2. | Meningkatnya pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat pedesaan | 1 | Jumlah kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat | 75 klp | Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | |
| | | 2 | Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG) | 10 klp | | |
| 3. | Terciptanya tata kelola pemerintahan nagari yang baik dan bersih | 1 | Jumlah tata kelola pemerintahan nagari yang baik | 75 nagari | Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintahan desa dan Pendidikan Politik Masyarakat | |
| | | 2 | Jumlah tata kelola pemerintahan nagari yang bersih | 75 nagari | | |
| 4. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam be KB | 1 | Rata-rata jumlah anak per keluarga | 2,5 | Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi | |
| | | 2 | Rasio Akseptor KB | 77,00 % | | |
| | | 3 | Kebutuhan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | 10,88 | | |
| 5. | Meningkatkan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi | 1 | Jumlah Remaja yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi | 2.500 org | Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan | |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|--------|---|--|
| | | | | | KB/KR yang mandiri | |
| | | 2 | Jumlah Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif | 14 klp | | |
| 6. | Meningkatnya pemberdayaan ketahanan keluarga | 1 | Jumlah kelompok BKB BKR, BKL dan UPPKS yang mandiri | 70 klp | Penyiapan tenaga pendamping bina keluarga | |
| | | 2 | Jumlah Kelompok BKB Holistik Integratif | 8 klp | | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2018

Dalam pelaksanaan program, sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar menggunakan metode dalam pengukuran capaian kinerja menggunakan sistim indikator kinerja yang terdiri dari : *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*.

Untuk mewujudkan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar ditentukan pembobotan sampai pada tingkat *outcome*, hal ini disebabkan untuk dapat menilai ketinggian indikator *benefit* dan *impact* memerlukan jangka waktu panjang melalui survey dan penelitian yang mendalam karena kegiatan yang dilakukan menyangkut pembinaan usaha dan tingkat keterampilan dengan dimensi waktu yang panjang.

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 telah ditetapkan dengan menggambarkan sasaran strategis yang ingin dicapai dan indikator kinerja serta target kinerja yang akan memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi.

Pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2021, mengacu pada RPJMD 2016-2021. Pencapaian sasaran strategis dan indikator-indikatornya pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan SKPD dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi

| No | Indikator Kinerja | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | Target Tahun 2021 (akhir Renstra) | % |
|-----|---|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|-----------------------------------|------|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1. | Aparatur yang berkualitas dalam pelaksanaan tugas | 90 % | 90% | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100 % | 100% |
| 2. | Akuntabilitas Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD yang baik | 4 dok | 4 dok | 100 % | 2 dok | 2 dok | 100 % | 2 dok | 2 dok | 100% | 12 dok | 66% |
| 3. | Dokumen Perencanaan SKPD yang didukung data informasi yang akurat | 6 dok | 6 dok | 100 % | 4 dok | 4 dok | 100 % | 4 dok | 4 dok | 100% | 22 dok | 64% |

Dari indikator keberhasilan dalam meningkatkan kinerja SKPD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat tahun 2018 didukung oleh program berikut:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan
- Program Pengembangan Data/Informasi

Dari 3 (tiga) indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan serta langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

- Faktor Keberhasilan
 - Adanya komitmen dari PNS
 - Perencanaan kerja yang terprogram

- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup
 - Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait
 - Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
- Faktor Kegagalan
- Tidak ada faktor kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan bahkan materi lomba bertambah dari materi yang diprogramkan.

Sasaran 2 : Meningkatkan Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

| No. | Indikator Kinerja | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | Target Tahun 2021 (akhir Renstra) | % |
|-----|---|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|-----------------------------------|------|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1. | Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan | 70 % | 70 % | 100 % | 75% | 75% | 100% | 75% | 75% | 100 | 85% | 88% |
| 2. | Persentase kapasitas lembaga kemasyarakatan kader pemberdayaan Masyarakat | 80 % | 80 % | 100% | 85% | 85% | 100% | 85% | 85% | 100 | 89% | 95% |
| 3. | Persentase kelompok ekonomi perempuan yang aktif | 77 % | 77 % | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 100 | 86% | 94% |

Berdasarkan Indikator keberhasilan terlaksananya kegiatan yang merupakan tolok ukur sasaran yang akan dicapai, dimana target pelaksanaan kegiatan diarahkan pada kelompok dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Adapun program yang mendukung capaian yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 adalah :

- *Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan*
- *Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa*

Dari indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan dan permasalahan serta langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya :

-Faktor Keberhasilan

- Koordinasi yang baik antar instansi/badan dan organisasi terkait dalam daerah;
- Perencanaan kerja yang terprogram;
- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup;
- Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait;
- Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan; dan
- Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat.

- Faktor Hambatan

- Tidak ditemuinya hambatan dan kendala yang signifikan terhadap pelaksanaan program ini.

Sasaran 3 : Meningkatnya pengembangan kelembagaan usaha ekonomi pedesaan

| No. | Indikator Kinerja | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | Target Tahun 2021 (akhir Renstra) | % |
|-----|---|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|-----------------------------------|------|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1. | Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat | 75 klp | 75 klp | 100 % | 75 klp | 75 klp | 100 % | 75 klp | 75 klp | 100 | 100 klp | 75% |
| 2. | Jumlah kelompok masyarakat pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG) | 6 klp | 6 klp | 100 % | 8 klp | 8 klp | 100 % | 10 klp | 10 klp | 100 | 14 klp | 71% |

Berdasarkan Indikator keberhasilan terlaksananya kegiatan yang merupakan tolok ukur sasaran yang akan dicapai, dimana target pelaksanaan kegiatan diarahkan pada kelompok dan lembaga

pemberdayaan masyarakat. Adapun program yang mendukung capaian yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 adalah :

- *Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.*

Dari indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan dan permasalahan serta langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya :

-Faktor Keberhasilan

- Koordinasi yang baik antar instansi/badan dan organisasi terkait dalam daerah;
- Perencanaan kerja yang terprogram;
- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup;
- Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait;
- Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan; dan
- Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat.

- Faktor Hambatan

-

- Tidak ditemuinya hambatan dan kendala yang signifikan terhadap pelaksanaan program ini.

Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam ber KB

| No | Indikator Kinerja | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | Target Tahun 2021 (akhir Renstra) | % |
|-----|---|---------|-----------|------|--------|-----------|------|---------|-----------|------|-----------------------------------|------|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1. | Rata-rata jumlah anak per keluarga | 2,9 | 2,9 | 100% | 2,7 | 2,58 | 97% | 2,5 | 2,58 | 97 % | 2,1 | 77 % |
| 2. | Ratio Akseptor KB | 68,86 % | 68,86 % | 100% | 73,87 | 73,87 | 100% | 77,00 % | 75,20 % | 98 % | 79,50% | 95 % |
| 3 | Kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | 12,5 | 11,5 | 100% | 11,5 | 11,5 | 100% | 10,88 | | | 8,00 | |

Dari indikator keberhasilan terlaksananya kegiatan yang ditetapkan sebagai tolak ukur sasaran yang ingin di capai, dimana target pelaksanaan diarahkan kepada penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB seperti penyediaan Balai Penyuluh KB, penyediaan dan pemasangan alat-alat kontrasepsi, penyuluhan KB telah terealisasi pada Tahun 2018 di dalam penyusunan perencanaan sebelum Rencana Strategis dicantumkan dalam program :

- *Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*
- *Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR*
- *Keluarga Berencana*
- *Pelayanan Kontrasepsi*
- *Kesehatan Reproduksi Remaja*

Dari indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan serta langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

-Faktor Keberhasilan :

- Koordinasi yang baik antar Instansi/Badan dan organisasi terkait dalam daerah.
- Terlaksananya perencanaan kerja yang terprogram
- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai
- Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM yang terkait
- Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
- Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat

Faktor Kegagalan :

Selama pelaksanaan program berlangsung tidak ditemui faktor kegagalan dan permasalahan serta hambatan dalam upaya pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran 5 : Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi

| No | Indikator Kinerja | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | Target Tahun 2021 (akhir Renstra) | % |
|-----|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------------------------------|------|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1. | Jumlah PIK-R yang aktif | 6 klp | 6 Klp | 100% | 8 klp | 8 klp | 100 % | 14 klp | 17 klp | 121 % | 26 klp | 65 % |
| 2. | Jumlah remaja yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan reproduksi | 2.000 org | 2.000 org | 100% | 2.400 org | 2.400 org | 100% | 2.500 org | 2.500 org | 100 % | 3.500 org | 71 % |

Dari indikator keberhasilan terlaksananya kegiatan yang ditetapkan sebagai tolok ukur sasaran yang ingin dicapai, dimana target pelaksanaan diarahkan kepada pembinaan kelompok Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIK-R) di sekolah-sekolah. telah terealisasi pada Tahun 2018 didalam

penyusunan perencanaan sebelum Rencana Strategis dicantumkan dalam program :

- *Kesehatan Reproduksi Remaja*
- *Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR*

Dari indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan serta langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

Faktor keberhasilan :

- Koordinasi yang baik antar Instansi/Badan dan organisasi terkait dalam daerah.
- terlaksananya perencanaan kerja yang terprogram
- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai
- tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM yang terkait
- adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
- Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat

Faktor Kegagalan :

Selama program berlangsung tidak ditemui kendala yang dapat menjadi faktor kendala serta permasalahan yang berarti dalam upaya pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Sasaran 6 : Meningkatkan pemberdayaan ketahanan keluarga

| No | Indikator Kinerja | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | Target tahun 2021 (akhir Renstra) | % |
|-----|--|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|------|-----------------------------------|------|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | | |
| (1) | (2) | | (4) | (5) | (6) | | (7) | (8) | | (9) | | |
| 1. | Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang aktif | 42 klp | 42 KLP | 100 % | 56 klp | 56 klp | 100 % | 70 klp | 64 klp | 91 % | 112 klp | 57 % |
| 2. | Jumlah kelompok BKB Holistik Integratif | 4 klp | 4 klp | 100 % | 5 klp | 5 klp | 100 % | 8 klp | 8 klp | 100 | 17 klp | 47 % |

Dari indikator keberhasilan terlaksananya kegiatan yang ditetapkan sebagai tolok ukur sasaran yang ingin dicapai, dimana target pelaksanaan diarahkan kepada pembinaan kelompok Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIK-R) di sekolah-sekolah. telah terealisasi pada Tahun 2018 didalam penyusunan perencanaan sebelum Rencana Strategis dicantumkan dalam program :

- *Kesehatan Reproduksi Remaja*

Dari indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan serta langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

Faktor keberhasilan :

- Koordinasi yang baik antar Instansi/Badan dan organisasi terkait dalam daerah.
- terlaksananya perencanaan kerja yang terprogram
- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai
- tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM yang terkait
- adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
- Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat

Faktor Kegagalan :

Selama program berlangsung tidak ditemui kendala yang dapat menjadi faktor kendala serta permasalahan yang berarti dalam upaya pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran 7 : Terciptanya Tata kelola pemerintahan nagari yang baik dan bersih

| No | Indikator Kinerja | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | Target Tahun 2021 (akhir Renstra) | % |
|-----|--|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|------|-----------------------------------|-------|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1. | Jumlah Tata kelola pemerintahan Nagari yang baik | 75 Nagari | 75 nagari | 100 % | 75 nagari | 75 Nagari | 100 % | 75 Nagari | 75 Nagari | 100 | 75 Nagari | 100 % |
| 2. | Jumlah Tata kelola pemerintahan nagari yang bersih | 75 nagari | 75 nagari | 100 % | 75 nagari | 75 nagari | 100 % | 75 nagari | 75 nagari | 100 | 75 nagari | 100 % |

Dari indikator keberhasilan terlaksananya kegiatan yang ditetapkan sebagai tolok ukur sasaran yang ingin dicapai, dimana target pelaksanaan diarahkan kepada pembinaan kepada nagari di Kabupaten Tanah Datar dan telah terealisasi pada Tahun 2018 didalam penyusunan perencanaan sebelum Rencana Strategis dicantumkan dalam program :

- Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Program Pendidikan Politik Masyarakat
- Program Kerjasama Pembangunan
- Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari

Dari indikator kinerja diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan, hambatan dan permasalahan serta langkah-langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :

Faktor keberhasilan :

- Koordinasi yang baik antar Instansi/Badan dan organisasi terkait dalam daerah.
- terlaksananya perencanaan kerja yang terprogram
- Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai
- tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM yang terkait
- adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan
- Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat

Faktor Kegagalan :

Selama program berlangsung tidak ditemui kendala yang dapat menjadi faktor kendala serta permasalahan yang berarti dalam upaya pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

3.2.Realisasi Anggaran

Salah satu keberhasilan sebuah program dan kegiatan adalah dengan mengetahui serapan anggaran yang telah direalisasikan dan dapat dilihat sebagai berikut :

URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

A. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. Program, Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

DINAS PMDPPKB

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian materai, perangko dan benda-benda pos lainnya.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp.3.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.000.000,- atau 100 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran rekening listrik, air dan telepon Kantor.

Dana yang dianggarkan sebesar sebesar Rp.43.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.36.219.974.- atau 84,23 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

c. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran pajak 60 (enam puluh) unit kendaraan roda dua dan 7 (tujuh) unit kendaraan roda empat.

Dana yang dianggarkan sebesar Rp.17.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar 16.739.000.- atau 98,46 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian bahan, material dan alat-alat untuk kebersihan.

Dana yang dianggarkan Rp.5.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar realisasi Rp.4.999.500.- atau 99,99 %. dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan alat tulis kantor.

Dana yang dianggarkan Rp 47.183.700.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 47.182.000.- atau 99,99 % dan fisik 100 % Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan barang cetak dan penggandaan.

Dana yang dianggarkan Rp.29.181.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.29.135.950.- atau 99,85 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Dana yang dianggarkan Rp.7.500.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 7.495.000.- atau 99,93 % dan fisik 100 %.

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini terealisasi berupa langganan surat kabar harian dan mingguan.

Dana yang dianggarkan Rp.5.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.5.500.000.- atau 100 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini terealisasi berupa penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu.

Dana yang dianggarkan Rp.28.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.27.891.600.- atau 99,61 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

j. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Kegiatan ini terealisasi berupa koordinasi, konsultasi serta konfirmasi, pembinaan dan mengikuti rapat-rapat dalam dan luar daerah.

Dana yang dianggarkan Rp.104.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 103.594.200.- atau 99,61 % dan fisik 100 % Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik

k. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran honorarium 7 (tujuh) orang pegawai Tenaga Harian Lepas (THL).

Dana yang dianggarkan Rp.89.352.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.88.200.000.- atau 100 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik

1. Kegiatan Penilai Angka Kredit Tenaga Fungsional.

Kegiatan ini terealisasi berupa honorarium tim penilai angka kredit dan bahan kenaikan pangkat bagi pegawai fungsional penyuluh KB. Dana yang dianggarkan Rp.8.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0.- atau 0 % dan fisik 0 %.

Tidak terealisasinya kegiatan ini disebabkan karena tidak adanya pegawai fungsional penyuluh KB yang naik pangkat pada tahun 2018 ini.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan 14 unit Proyektor + Layar, 14 (empat belas) unit Lap Top, 14 (empat belas) unit Printer untuk 14 Balai Penyuluh KB dan 1 (satu) unit Komputer PC untuk Gudang alat dan obat kontrasepsi.

Dana yang dianggarkan Rp.268.382.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.255.636.220.- atau 95,25 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pengecatan pagar, pencoran halaman kantor.

Dana yang dianggarkan Rp20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.19.998.000.- atau 99,99 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)/pelumas, suku cadang dan biaya service 7 (tujuh) unit kendaraan roda empat dan 15 unit kendaraan roda dua.

Dana yang dianggarkan Rp.125.515.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.125.495.046.- atau 99,98 % dan fisik 100 % Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pemeliharaan/service komputer, Laptop dan printer.

Dana yang dianggarkan Rp.10.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.975.000.- atau 99,75 % dan fisik 100 % Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

e. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala pelengkapan Gedung Kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa perbaikan/service 7 (tujuh) unit AC, Televisi.

Dana yang dianggarkan Rp.10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.950.000.- atau 99,50 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

f. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kegiatan ini terealisasi berupa pembangunan pagar Balai Penyuluh KB Kecamatan Sungai Tarab.

Dana yang dianggarkan Rp.55.941.826.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.53.340.000.- atau 95,35 % dan fisik 100 % Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Kegiatan ini terealisasi berupa mengikuti pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi.

Dana yang dianggarkan Rp. 10.0000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 8.670.000.- atau 86,70 % dan fisik 100 % Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Rutin.

Dana Rp.4.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.872.000.- atau 84,17 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan Laporan Semester dan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Dana yang dianggarkan Rp.5.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.992.000.- atau 99.84 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

c. **Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan**

Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA.

Dana yang dianggarkan Rp.10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.990.800.- atau 99,91 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

a. **Kegiatan Sosialisasi dan Temu Kader Posyandu.**

Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan lomba kader posyandu terintegrasi tingkat kabupaten dan mengikuti lomba tingkat provinsi, temu kader posyandu tingkat provinsi, pelatihan administrasi posyandu tingkat kabupaten di 14 kecamatan, rapat pokjandal ketua posyandu dan penyediaan format IV SIP posyandu dan SIP VII posyandu.

Dana yang dianggarkan Rp.276.500.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.219.866.800.- atau 79,52 % dan fisik 100 % Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

b. **Kegiatan Sosialisasi, Pembinaan dan Orientasi PMT-AS**

Kegiatan ini terealisasi berupa rapat awal pelaksanaan PMT-AS, sosialisasi kegiatan PMT-AS, rapat teknis, pelatihan memasak, pemberian PMT-AS untuk 8 (delapan) SD pada 8 (delapan) nagari dan 8 (delapan) kecamatan selama 60 (enam puluh) kali pemberian, monitoring dan evaluasi ke kecamatan dan rapat evaluasi tingkat kabupaten.

Dana yang dianggarkan Rp.271.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.257.480.500.- atau 95,01 % dan fisik 100 % Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

c. Kegiatan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan masyarakat.

Kegiatan ini terealisasi berupa Pembinaan ke Nagari Binaan Gerakan PKK untuk persiapan lomba Gerakan PKK tingkat provinsi Sumatera Barat pada 5 Nagari yaitu Nagari Labuah kecamatan Lima Kaum, nagari Situmbuak kecamatan Salimpaung, nagari Sumpur kecamatan Batipuh Selatan, nagari Buo kecamatan Lintau Buo dan nagari Andaleh Baruh Bukit kecamatan Sungayang, penandatnganan Perjanjian Kerjasama antara Pemda Kabupaten Tanah Datar dengan PKK dan P3MD, melaksanakan lomba 10 program pokok PKK dan mengikuti lomba tingkat Provinsi dan Nasional, melaksanakan rapat-rapat tingkat kabupaten, mengikuti rapat-rapat tingkat nasional, mengikuti jambore kader PKK berprestasi tingkat provinsi dan tingkat nasional, melaksanakan Gebyar Kader tingkat kabupaten, melaksanakan pembinaan administrasi dasa wisma, pola asuh, parenting ke kecamatan dan nagari, melaksanakan konsultasi ke provinsi, melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Depok dan TP-PKK Pusat, mengikuti kegiatan pertemuan Isteri Kepala Daerah, mengikuti TMMN/D, TDS, Pesona Budaya Minang Kabau, mengikuti kegiatan Musrenbang, mengikuti Penganangan Bulan Bhakti Dasa Wisma tingkat provinsi, mengikuti penilaian sekolah sehat tingkat kabupaten dan provinsi, melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan, melaksanakan pelantikan Ketua TP.PKK Kecamatan pada 3 (tiga) kecamatan, mengikuti Bimtek Sistem Informasi Posyandu di Jakarta.

Hasil yang diperoleh adalah Juara umum Jambore Kader PKK berprestasi tingkat Provinsi , Juara harapan I lomba Iva Test tingkat provinsi, Juara I lomba Yel-yel Dasa Wisma tingkat provinsi, Juara I lomba Parade Yel-yel tingkat provinsi, Juara I lomba UP2K PKK tingkat provinsi, Juara II lomba Forikan tingkat provinsi, juara III lomba tertib administasi PKK dan dasa wisma tingkat provinsi, Juara III lomba Hatinya PKK tingkat provinsi, juara harapan I lomba simulasi PAAR tingkat provinsi,

Juara II lomba B2SA tingkat provinsi, Juara II lomba PMTAS tingkat provinsi dan Juara harapan I lomba bahan pangan lokal dan lomba kudapan tingkat provinsi, melaksanakan pertemuan/rapat bulanan LKAAM, melaksanakan Pati Ambalau pengurus LKAAM Tanah Datar periode 2017 – 2022, mengikuti kegiatan IKTD di Jakarta, mengikuti rakor LKAAM tingkat provinsi, menghadiri kegiatan adat baik di nagari, kabupaten dan provinsi, melaksanakan Sosialisasi dan Musyawarah Kerja Daerah tingkat Kabupaten dan penggadaaan sarana kerja LKAAM.

Dana yang dianggarka Rp.1.050.920.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.016.203.627.- atau 96,70 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

d. Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan ini terealisasi berupa Mengikuti rapat koordinasi P3MD tingkat Provinsi Sumatera Barat di Padang, Melaksanakan Pelatihan Teknis Pembuatan Desain dan RAB bagi perangkat dan Kader Teknis Nagari, melaksanakan rapat koordinasi P3MD tentang Percepatan pencairan dana Desa/Nagari yang bersumber dari APBN tahun 2018, Melaksanakan rapat koordinasi P3MD tentang Percepatan penyusunan RKP dan RAPB Nagari tahun 2019, Melaksanakan rapat percepatan penyusunan RPJM Nagari, Mengikuti sosialisasi, workshop, pengelolaan dana desa/nagari tahun 2018 di Jakarta, Mengikuti Pelatihan tenaga pelatih Pembina teknis pengelolaan dana desa/nagari tahun 2018 di Jakarta, mengikuti rapat koordinasi pengembangan kawasan pedesaan di Jakarta, memfasilitasi pembentukan Tim pelaksana inovasi desa tingkat kecamatan sebanyak 14 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, melaksanakan sosialisasi program inovasi desa di 14 Kecamatan, melaksanakan Bursa Inovasi Desa tingkat Kabupaten Tanah Datar,

memfasilitasi aparaturnya pemerintah nagari untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas tahun 2018 di Padang, memfasilitasi penilaian pembina terbaik pelaksanaan dana desa, transparansi pelaksanaan dana desa tahun 2018.

Dana yang dianggarkan Rp.268.332.300.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.267.617.969.- atau 99,73 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

6. Program Kerjasama Pembangunan

a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga.

Kegiatan ini terealisasi berupa Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 96 tahun 2017 tentang Tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa dan penyusunan rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar yang mengatur tentang tata cara kerjasama nagari.

Dana yang dianggarkan Rp.95.485.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.78.335.908.- atau 82,04 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

b. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kegiatan ini terealisasi berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama nagari baik kerjasama antar nagari maupun kerjasama nagari dengan pihak ketiga.

Dana yang dianggarkan Rp.52.708.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.31.921.100.- atau 60,56 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

a. Kegiatan Fasilitasi Permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan.

Kegiatan ini terealisasi berupa Pembinaan dan fasilitasi permodalan terhadap Bumhag.

Dana yang dianggarkan Rp.72.183.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.66.286.100.- atau 91,83 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

b. Kegiatan Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Kegiatan ini terealisasi berupa Pembinaan terhadap Koperasi nagari yang mengelola Kredit Mikro Nagari (KMN), pelaksanaan pembinaan usaha ekonomi masyarakat simpan pinjam dan tersedianya data usaha ekonomi masyarakat simpan pinjam KMN dan UEM-SP melalui sosialisasi dan pendataan ke setiap nagari.

Dana yang dianggarkan Rp.50.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.40.667.200.- atau 81,33 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

d. Kegiatan Pembinaan dan gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)

Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan promosi TTG tingkat Provinsi di Kabupaten Pesisir Selatan dan Tingkat Nasional di Bali, pelaksanaan sosialisasi dan pembentukan Posyantek baru di nagari dan Kecamatan, dan pelaksanaan pembinaan Posyantek di Kabupaten Tanah Datar.

Dana yang dianggarkan Rp. 131.000.000.- dengan

realisasi keuangan sebesar Rp.110.667.839.- atau 84,48 % dan fisik 100 % Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

8. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari

a. Kegiatan Pengelolaan Aset Nagari

Kegiatan ini terealisasi berupa Pembinaan Pengelolaan Aset Nagari dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) dan melaksanakan monitoring pengelolaan aset nagari ke nagari-nagari di Kabupaten Tanah Datar.

Dana yang dianggarkan Rp. 117.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.91.151.651.- atau 77,91 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

a. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.

Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan Musrenbang nagari tahun 2018, terwujudnya musrenbang nagari sesuai dengan prosedur dan mekanismenya, telah lahirnya usulan skala prioritas yang berbasis pemberdayaan masyarakat, telah lahirnya dokumen RKP Nagari yang akan didanai oleh APB Nagari dan DU RKP yang akan didanai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN atau sumber dana lainnya.

Dana yang dianggarkan Rp.40.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.39.857.800.- atau 99,64 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

b. Pemberian Stimulan pembangunan desa

Kegiatan ini terealisasi berupa perekrutan dan pembayaran tunjangan hidup tenaga SPMN sebanyak 2 (dua) orang di nagari Pariangan dan nagari Tanjung Bonai, melaksanakan monitoring ke lapangan, melaksanakan rapat evaluasi kegiatan.

Dana yang dianggarkan Rp.30.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.29.975.000.- atau 99,92 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

c. Kegiatan Pembinaan Nagari Berprestasi.

Kegiatan ini terealisasi berupa Pelaksanaan pembinaan Nagari tingkat kecamatan salimpaung untuk penilaian tingkat Provinsi Sumatera Barat, sementara Kabupaten Tanah Datar tidak masuk nominasi untuk penilaian nagari berprestasi tingkat propinsi Sumatera Barat tahun 2018.

Dana yang dianggarkan Rp.17.650.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.16.926.800.- atau 95,90 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

d. Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong.

Kegiatan ini terealisasi berupa Penyiapan administrasi pendukung kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), melaksanakan kegiatan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 15 Oktober 2018 di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di tingkat jorong, nagari dan kecamatan, menghadiri pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi Sumatera Barat, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan TMMD/N tahun 2018.

Dana yang dianggarkan Rp.200.297.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.179.710.450.- atau 89,72 % dan fisik 100 % Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik

e. Kegiatan Peningkatan dan Fasilitasi Operasional Profil dan data Nagari

Kegiatan ini terealisasi berupa Mengikuti rapat kerja pengelolaan data profil nagari, mengikuti Bimbingan Teknis pengelolaan data profil nagari, mengikuti rapat koordinasi pengelolaan data profil nagari, melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi pengelolaan data profil nagari di Kabupaten Tanah Datar dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pengolahan data profil nagari tahun 2018.

Dana yang dianggarkan Rp.30.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.26.807.000.- atau 89,36 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

f. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan ini terealisasi berupa mengikuti kegiatan uji fungsi Pamsimas, melaksanakan rapat kerja tingkat kabupaten dan mengikuti rakor pamsimas tingkat provinsi, mengikuti lomba BP-SPAMS berprestasi tingkat provinsi dengan mendapat juara II.

Dana yang dianggarkan Rp.40.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.27.614.400.- atau 69,04 % dan fisik 100 % Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

g. Kegiatan Pembinaan LPM

Kegiatan ini terealisasi berupa Mengikuti rapat kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Padang, mengikuti Bimbingan Teknis LPM tingkat Provinsi Sumatera Barat, mengikuti rapat koordinasi LPM tingkat Provinsi Sumatera Barat, mengikuti Masyawarah Daerah DPD LPM Provinsi, mengikuti rapat koordinasi LPM tingkat Provinsi Sumatera Barat di Padang, melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi LPM nagari se Kabupaten Tanah Datar, melaksanakan monitoring dan evaluasi LPM nagari tahun 2018 dan melaksanakan musyawarah dan rapat kerja DPD dan DPC LPM se Kabupaten Tanah Datar. Dana yang dianggarka Rp.52.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.41.559.400.- atau 79,92 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

h. Kegiatan Koordinasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Proses pemberlajaran Masyarakat (KKN-PPM)

Kegiatan ini terealisasi berupa Fasilitasi kegiatan KKN-PPM Perguruan Tinggi se Provinsi Sumatera Barat, Lokakarya/pelatihan pembuatan Website nagari, monitoring dan evaluasi Website nagari dan penandatanganan Mou Universitas Negeri Padang dengan Pemda Kabupaten Tanah Datar di bidang Pendidikan.

Dana yang dianggarkan Rp.20.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.17.678.600.- atau 88,39 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

10. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

a. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pesedesaan

Kegiatan ini terealisasi berupa Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan pembangunan kawasan pedesaan yang diikuti oleh Sekretaris nagari se Kabupaten Tanah Datar yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di Bukittinggi.

Dana yang dianggarkan Rp.92.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.82.199.300.- atau 89,35 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik

b. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa.

Kegiatan ini terealisasi berupa Bimbingan Teknis/Pendidikan dan Pelatihan tentang manajemen pemerintahan desa bagi Ketua BPRN se Kabupaten Tanah Datar sebanyak 75 orang selama 3 (tiga) hari di Bukittinggi.

Dana yang dianggarkan Rp.112.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.100.715.100.- atau 89,92 dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik

c. Kegiatan Penilaian Kompetensi Wali nagari.

Kegiatan ini berupa Penilaian kompetensi Wali Nagari tingkat Kabupaten Tanah Datar yang diikuti oleh 14 (empat belas) orang wali nagari yang mewakili masing-masing kecamatan.

Dana yang dianggarkan Rp.82.750.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.67.303.200.- atau 81,33 % dan fisik 100%. Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

d. Kegiatan penilaian KAN terbaik tingkat Kabupaten Tanah Datar

Kegiatan ini berupa Penilaian Kerapatan Adat Nagari (KAN) tingkat Kabupaten Tanah Datar.

Dana yang dianggarkan Rp.83.250.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.73.221.000.- atau 87,95 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat dilaksanakan dengan baik

e. Kegiatan Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari.

Dana kegiatan ini terealisasi berupa penilaian kompetensi sekretaris nagari tingkat Kabupaten Tanah Datar yang diikuti oleh 14 (empat belas) sekretaris nagari mewakili masing-masing kecamatan.

Dana yang dianggarkan Rp. 40.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.25.816.200.- atau 64,54 % dan fisik 100%

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat dilaksanakan dengan baik.

f. Kegiatan Penilaian BPRN

Kegiatan ini terealisasi berupa penilaian kompetensi BPRN tingkat Kabupaten Tanah Datar yang diikuti oleh 12 (dua belas) orang Ketua BPRN.

Dana yang dianggarkan Rp.50.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.37.573.900.- atau 75,15 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat dilaksanakan dengan baik.

11. Program Pendidikan Politik masyarakat.

a. Kegiatan Fasilitasi pemilihan dan pelantikan Wali Nagari

Kegiatan ini akan dilaksanakan berupa pemilihan dan pelantikan wali nagari namun kita tidak melaksanakannya karena kita merencanakan akan melaksanakan pemilihan dan pelantikan wali nagari serentak tahap II yang akan diikuti oleh 21 (dua puluh satu) nagari, sedangkan pada tahun 2018 ini kegiatannya berupa fasilitasi masalah gugatan terhadap wali nagari dan panitia pemilihan Kabupaten yang masuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Padang dan Medan dan hasilnya dari 3 (tiga) gugatan tersebut dimenangkan semuanya oleh Panitia pemilihan kabupaten selaku tergugat.

Dana yang dianggarkan Rp.31.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.30.732.500.- atau 99,14 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat dilaksanakan dengan baik.

12. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

a. Kegiatan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan produk Peraturan Perundang-undangan dan telah melahirkan 1 (satu) buah Perda yaitu Perda nomor 5 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari dan 2 (dua) buah Peraturan Bupati yaitu Perbup nomor 53 tentang pemilihan wali nagari antar waktu dan perbup nomor 54 tentang SOTK nagari.

Dana yang dianggarkan Rp.274,302,000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.199.805.047,- atau 72,84 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Sosialisasi produk hukum

Kegiatan ini terealisasi berupa Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan ditetapkan Perda nomor 5 tahun 2018 dan Perbup nomor 53 dan 54 maka telah dilaksanakan sosialisasinya bagi seluruh Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, BPRN, KAN, Sekretaris Nagari, Bendahara nagari serta perangkat nagari lainnya.

Dana yang dianggarkan Rp.90.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.46.739.200.- atau 51,93 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat dilaksanakan dengan baik.

B. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

I. Program, Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

1. Program Keluarga Berencana

a. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana.

Kegiatan ini terealisasi berupa Pembinaan terhadap kader KB di 14 kecamatan dan kegiatan dengan mitra (IBI, TNI, PKK) berupa penancangan dan penilaian IBI KB KED, HKG-PKK KB KES dan TNI KB KES tingkat kecamatan dan Kabupaten serta pelaksanaan pertemuan 1.000 kader (Gebyar 1.000 Kader).

Dana yang dianggarkan Rp.204.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.174.419.700.- atau 85,29 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

b. Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling

Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018, terealisasi berupa pengadaan sarana kerja petugas PPKBJ/Sub PPKBJ sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) paket untuk Kader KB di Kecamatan Sungayang, Batipuh Selatan, Padang Ganting dan Tanjung Baru.

Dana yang dianggarkan Rp.552.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.481.102.300,- atau 87,49 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Operasional KB

Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2018 berupa bantuan operasional penyuluh KB pada 14 Balai Penyuluh KB, operasional penggerakan program KKBPK di Kampung KB, operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi, dukungan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan manajemen BOKB.

Dana yang dianggarkan Rp.3.446.846.900.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.146.490.802.- atau 33,26 % dan fisik 100 %

Rendahnya realisasi kegiatan ini disebabkan oleh keterlambatan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh BKKBN.

d. Kegiatan Desiminasi Kebijakan Pengendalian kependudukan.

Kegiatan ini berupa pertemuan dan sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) pada siswa/i SMAN 1 Batipuh dan SMAN 2 Rambatan.

Dana yang dianggarkan Rp.56.144.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.53.164.800.- atau 94,69 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala dan dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Program pembinaan peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri

a. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran Transportasi bagi 1.000 kader PPKBJ dan Sub PPKBJ se Kabupaten Tanah Datar selama 12 bulan dengan indeks Rp.35.000,-/orang dan keikutsertaan Jambore Kader KB tingkat Provinsi di Kabupaten Pesisir Selatan (Pantai Carocok) serta sosialisasi Bina Keluarga Lansia (BKL), mengikuti kegiatan HARGANAS tingkat provinsi di Padang Pariaman dan Nasional di Manado.

Dana yang dianggarkan Rp.613.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.610.248.300,- atau 99,55 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala dan dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Keluarga Balita

a. Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan.

Kegiatan ini terealisasi berupa pelatihan bagi tenaga pendamping Bina Keluarga Balita (BKB) sebanyak 60 (enam puluh) orang peserta.

Dana yang dianggarkan Rp.40.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.37.615.600,- atau 94,04 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala dan dapat dilaksanakan dengan baik.

4. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

a. Kegiatan Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan Pemilihan Duta Genre tingkat Kabupaten Tanah Datar, ikutsertanya kontingen Tanah Datar pada Temu Kreatifitas PIK Remaja/Mahasiswa dan Jambore Saka

Kencana di Kota Sawahlunto serta pembinaan remaja Genre Tanah Datar.

Dana yang dianggarkan Rp.97.707.000.- dengan realisasi keuangan sebesar i Rp.95.187.700.- atau 97,42 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala dan dapat dilaksanakan dengan baik.

5. Program Pelayanan Kontrasepsi

a. Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Kegiatan ini terealisasi berupa belanja bantuan transportasi untuk akseptor KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD, Implant, Vasektomi dan Tubektomi, ikutsertanya pengelola program KB pada Upacara Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) di Manado serta belanja makan/minum pelayanan safari KB tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Dana yang dianggarkan Rp.111.184.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.93.334.300.- atau 83,95 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala dan dapat dilaksanakan dengan baik.

6. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

a. Kegiatan Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR.

Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan Pemilihan Duta Gendre tingkat Kabupaten Tanah Datar dan mengikuti pemilihan Duta Genre tingkat Provinsi Sumatera Barat serta pembentukan Forum Genre Luhak Nan Tuo Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari para siswa/i peserta Duta Genre Kabupaten Tanah Datar.

Dana yang dianggarkan Rp.44.250.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.43.530.000.- atau 98,37 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala dan dapat dilaksanakan dengan baik.

C. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

I. Program, Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

1. Program Data / Informasi

a. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan.

Kegiatan ini terealisasi berupa pengumpulan data/informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan dinas.

Dana Rp.19.150.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.10.150.250.- atau 53,00 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

a. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Kegiatan ini terealisasi berupa monitoring dan evaluasi terhadap asset dinas di Kecamatan dan Nagari.

Dana yang dianggarkan Rp.29.400.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.26.715.000.- atau 90,87 % dan fisik 100 %

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui kendala yang berarti dan dapat terlaksana dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa simpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2018, yakni:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar secara umum telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Berdasarkan Pengukuran Kinerja tahun 2018 pencapaian sasaran strategis pada umumnya berhasil diwujudkan dengan baik, hal ini terwujud karena adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan tupoksi yang didukung oleh alokasi anggaran yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.
3. Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, jika dilihat berdasarkan persentase rata-rata pencapaian sasaran strategis maka seluruhnya dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam tahun mendatang diharapkan tingkat capaian sasaran strategis dapat lebih baik sehingga target sasaran strategis jangka menengah pada akhirnya dapat tercapai.

B. SARAN

Untuk lebih efektifnya dalam pencapaian sasaran strategis, perlu disarankan sebagai berikut:

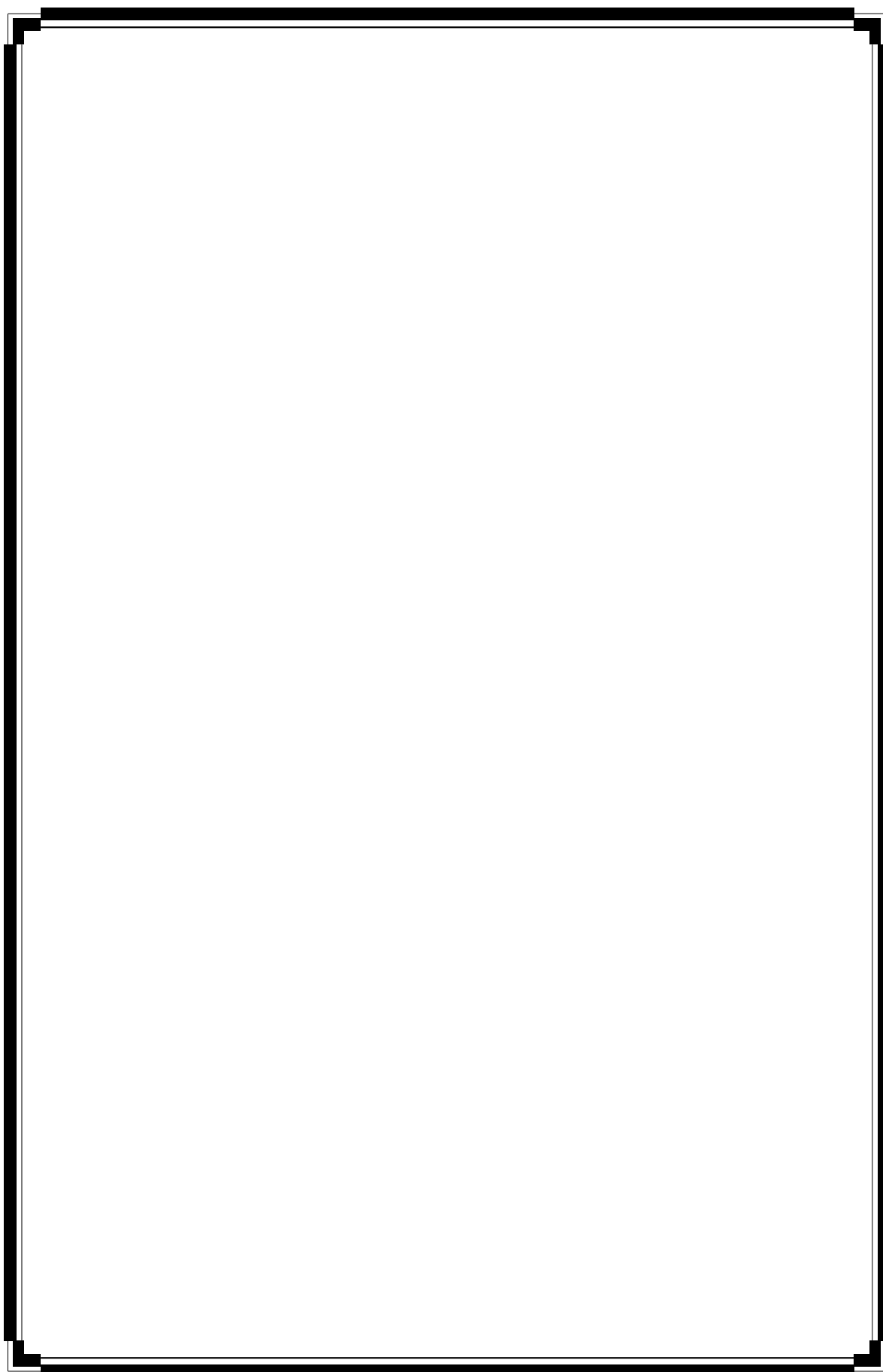
- a. Mempertimbangkan sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan pedoman analisis jabatan.
- b. Menyusun sistem kerja yang efektif dan efisien sebagai bagian dari optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

LAMPIRAN



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar isi..... | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja | 5 |
| a. Kewenangan | 5 |
| b. Struktur Organisasi dan Tata Kerja..... | 7 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KERJA | 26 |
| 2.1 Visi dan Misi..... | 26 |
| 2.2 Tujuan Strategis | 27 |
| a. Sasaran dan Program | 32 |
| b. Indikator Kinerja Utama | 34 |
| c. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 | 35 |
| d. Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2018 | 36 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 40 |
| 3.1 Capain Kinerja Organisasi Tahun 2018 | 40 |
| 3.2 Realisasi Anggaran..... | 50 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 74 |
| A.KESIMPULAN | 74 |
| B.SARAN | 74 |
| | iii |

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat merampungkan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018.

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2018, capaian kinerja tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Esensi dari sistem LKjIP bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Tanah Datar. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar

tersebut, siklus sistem LKjIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar telah mengupayakan agar seluruh program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kinerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum terealisasi secara optimal pada tahun 2018 sehingga dapat menjadi Indikator dan bahan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan kedepan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar ini disampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih.

Batusangkar, Januari 2019.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR,**



Drs. NOFENRIL

NIP. 19621120 199203 1 003